

## Polisi akan Gelar Perkara Kasus LGBT di Kafe Wow

JAKARTA (IM) - Polisi akan melakukan gelar perkara guna menentukan apakah perbuatan terduga LGBT yang dilakukan di kafe Wow, Pancoran, Jakarta Selatan yang viral di media sosial itu masuk unsur pidana ataukah tidak.

"Kita masih berproses, masih penyelidikan, nanti setelah itu akan gelar perkara," ujar Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budhi Herdi Susianto pada wartawan, Senin (13/6).

Sebelumnya penyidik Polres Jaksel telah meminta keterangan sejumlah pihak terkait laporan pemilik kafe Wow tentang dugaan keasusilan yang dilaporkannya itu. Nantinya, polisi bakal meminta keterangan dari pakar atau ahli pula.

"Memang kita menerima laporan dari pengelola kafe, melaporkan pasal 281. Sedang kita proses, apakah masuk unsurnya atau tidak," katanya.

Dia menambahkan, polisi juga bakal melakukan pendalaman lebih lanjut, apakah ada penyimpangan pada orang yang disebut-sebut sebagai terduga LGBT itu. Sejauh ini, polisi belum bisa berbicara banyak lantaran masih pendalaman.

Kapolsek Pancoran, Kompol Rudiyanto sebelumnya mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan (Jaksel) sebelumnya telah menyegel sementara Kafe Wow di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan pasca viralnya video LGBT. Penutupan sementara dilakukan pasca adanya pertemuan antara berbagai pihak.

"Hasil monitoring Kafe Wow untuk sementara waktu ditutup selama 1-3 hari dalam rangka pembinaan dan sosialisasi dari Pemda Jakarta Selatan," ujar Rudiyanto pada wartawan, Selasa (7/6).

Penutupan sementara itu dilakukan oleh Satpol PP Jakarta Selatan pasca adanya pertemuan di antara sejumlah pihak, seperti jajaran Pemkot Jakarta Selatan, kepolisian, pihak tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga sekitar serta pemilik kafe.

Di samping itu, pemilik kafe juga diminta membuat surat pernyataan dan imbauan tentang narkoba, asusila, dan tindak kejahatan lainnya.

"Pihak kafe berjanji akan membuat sistem baru agar hal serupa tidak terjadi lagi, dengan memperketat akses masuk untuk pengunjung yang datang," katanya.

Penutupan sementara dilakukan lantaran surat izin usahanya tak sesuai pasca dicek oleh Sudin Pariwisata Jaksel, yang mana saat dilakukan scan barcode izinnya tak muncul di barcode. Maka itu, surat izin usaha harus diurus ulang sesuai prosedur yang berlaku oleh pihak pemilik kafe selama kafe itu disegel.

Di samping itu, penutupan sementara dilakukan guna meredam amarah warga Kalibata yang resah dengan perbuatan terduga LGBT di kafe tersebut. Warga meminta pengelola kafe menjaga norma-norma kesusilaan di tempatnya itu, khususnya terkait LGBT.

● lus

# 12 | PoliceLine

FOTO: ANT



## Operasi Patuh Jaya 2022, Polisi Dahulukan Edukasi Ketimbang Tilang

Operasi Patuh Jaya 2022, Polantas Polda Metro dibantu teknologi ETLE, sehingga anggota di lapangan hanya memberikan teguran kepada pelanggar aturan lalin.

JAKARTA (IM) - Kakorlantas Polri, Irjen Pol Firman Shantyabudi memerintahkan kepada seluruh jajaran Polisi Lalu Lintas (Polantas) mendahulukan peran edukasi ketimbang pemberian sanksi tilang dalam Operasi Patuh 2022.

Menurutnya, tugas utama dalam operasi kali ini adalah meningkatkan ketertiban masyarakat dalam berlalulintas.

"Tidak menitik beratkan

kepada operasi yang dilaksanakan secara stasioner di jalan maupun mengejar target, menangkap tanda kutip, melakukan penindakan kepada para pelanggar sebanyak-banyaknya. Tidak," kata Firman saat memimpin dan memberikan arahan kepada jajaran Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri ketika apel gelar pasukan di Mapolda Metro Jaya, Senin (13/6).

Dalam operasi kali ini ja-

jaran polisi lalu lintas dibantu dengan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Sehingga kepada anggota yang berada di lapangan hanya memberikan teguran kepada pelanggar.

"Kita menitikberatkan pada kegiatan edukasi dan preventif. Kegiatan penegakan hukum akan kita laksanakan melalui kegiatan elektronik dan kegiatan teguran simpatik selama melakukan operasi di lapangan," jelasnya.

Operasi Patuh Jaya mulai digelar hari ini Senin 13 Juni hingga 14 hari ke depan 26 Juni 2022. Jajaran kepolisian nantinya akan diminta untuk hasil data evaluasi baik jenis pelanggaran yang paling ban-

yak dilakukan dan penyebab terjadi kemacetan. Sampai tindakan yang bisa menyebabkan kecelakaan.

Setiap di daerah akan ada jenis-jenis pelanggaran yang berbeda, pihaknya akan serahkan ini kepada satuan tugas daerah masing-masing Polda dan Polres.

"Jadi sekali lagi fokuskan perhatian kita arahan dan teguran simpatik yang dilaksanakan kepada masyarakat kepada pelanggaran yang dimaksud," katanya.

Adapun dalam gelaran Operasi Patuh Jaya 2022 ini terdapat delapan pelanggaran prioritas yang menjadi perhatian diantaranya:

1. Kendaraan yang menggunakan knalpot bising (tidak sesuai standar);
2. Kendaraan yang menggunakan rotator tidak sesuai dengan ketentuannya;
3. Balap liar;
4. Kendaraan yang melawan arus;
5. Menggunakan telepon genggam pada saat berkendara;
6. Tidak menggunakan helm SNI pada saat mengendarai motor
7. Tidak menggunakan sabuk pengaman pada saat mengemudikan mobil
8. Berboncengan lebih dari satu orang pada saat mengendarai motor. ● lus

## Khilafatul Muslimin Punya 30 Sekolah untuk Sebarkan Ideologi Khilafah

JAKARTA (IM) - Polda Metro Jaya sebut bahwa kelompok Khilafatul Muslimin memiliki kurang lebih 30 sekolah yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia untuk menyebarkan ideologi khilafah yang bertentangan dengan Pancasila.

Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan ketika menjelaskan hasil pemeriksaan seorang petinggi Khilafatul Muslimin bernisial AS (74), yang ditangkap di kawasan Mojokerto, Senin (13/6).

"Kami mendapatkan data bahwa ada beberapa sekolah, hampir 30 sekolah yang sudah terafiliasi dengan ajaran khilafah," ujar Zulpan kepada wartawan, Senin (13/6).

Menurut Zulpan, AS merupakan penanggung jawab dari puluhan sekolah yang diketahui berada di bawah naungan kelompok Khilafatul Muslimin itu.

Zulpan pun mengamini bahwa kelompok Khilafatul Muslimin menggunakan sekolah tersebut untuk menyebarkan ajaran khilafah.

Di sekolah tersebut pula, AS diduga menyebarkan doktrin terkait dengan ideologi khilafah.

"Belum bisa saya sampaikan sekarang (terkait bentuk sekolahnya). Yang jelas itu sudah terafiliasi dengan Khilafatul Muslimin. Artinya pemahaman khilafah itu sudah didoktrin oleh tersangka AS," ungkap Zulpan.

Saat ini, kata Zulpan, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap tersangka AS, untuk selanjutnya memeriksa sekolah-sekolah tersebut.

"Ya tentu nanti, setelah didapatkan data, penyidik akan langsung bekerja. Ya nanti kami jelaskan, dalam minggu-minggu ini pak Kapolda yang akan langsung menjelaskan," katanya.

Sebelumnya, pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja, telah ditetapkan tersangka. Dia ditangkap pada Selasa (7/6) pagi.

Penangkapan ini bermula ketika anggota Khilafatul Muslimin melakukan konvoi di kawasan Cawang, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. Video peristiwa tersebut sempat viral di media sosial.

Dalam video itu tampak



IDN/ANTARA

## LAYANAN JEMPUT BOLA VAKSINASI COVID-19 DI ACEH

Kapolsek Syamtalira Bayu Iptu Lilisma Suryani (kiri) memberi arahan kepada anggota Bhabinkamtibmas dan petugas kesehatan yang akan memberikan layanan jemput bola vaksinasi COVID-19 di Polsek Syamtalira Baru, Aceh Utara, Aceh, Senin (13/6). Polsek di jajaran Polres Lhokseumawe meluncurkan layanan jemput bola vaksinasi COVID-19 dengan sepeda motor ke desa-desa pedalaman yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat guna memberikan kemudahan kepada warga yang kesulitan mendatangi lokasi vaksinasi sekaligus untuk mendorong percepatan capaian vaksinasi COVID-19.

## Polri Kirim Surat ke Interpol untuk Cabut "Yellow Notice" Eiril

JAKARTA (IM) - Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia mengirim surat permohonan pencabutan Yellow Notice (pencarian orang) terhadap amak sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil RK, Emmeril Khan Mumtadz (Eiril), yang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal, Rabu (8/6).

Sekretaris NCB Interpol Polri Brigjen Amur Chandra mengatakan, secara faktual Yellow Notice akan ditutup ketika subjek yang dicari telah ditemukan.

"Ya secara faktual karena korban sudah ditemukan Yellow Notice pasti sudah tidak lagi diperlukan. Tapi secara administrasi perlu ditindaklanjuti secara resmi dari Polri," kata Amur dalam keterangan tertulis, Senin (13/6).

Amur mengatakan, Interpol Polri akan bersurat kepada Kantor Pusat Interpol di Lyon, Perancis, untuk menutup Yellow Notice itu. Dia menambahkan, pihaknya menindaklanjuti pencabutan Yellow Notice tersebut pada Senin (13/6).

Interpol Polri juga sudah melakukan komunikasi dengan Kepolisian Swiss. "Secara formal kami sudah bicara, mereka (kepolisian Swis) juga sudah bisa sama kami. Jadi untuk tertib administrasi kami tindaklanjuti hari kerja (Senin)," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Eiril dilaporkan hilang terseret arus saat berenang di

Sungai Aare, pada Kamis (26/5). Setelah 14 hari pencarian, pihak kepolisian Swiss berhasil menemukan jenazah Eiril.

Duta Besar RI untuk Swiss, Muliaman Hadad mengatakan, Eiril ditemukan pada Rabu (8/6) pagi. Selanjutnya, jenazah Eiril dipulangkan Swiss ke Indonesia pada Sabtu (11/6). Jenazah Eiril diberangkatkan dari Bandara Zurich, Swiss, pukul 10.10 waktu setempat atau sekitar 15.10 WIB.

Almarhum pun tiba di Terminal Kargo Jenazah, Bandara Soekarno-Hatta, sekitar pukul 15.56 WIB pada Minggu (13/6). Setelah itu, Eiril dibawa ke Gedung Pakuan untuk disemayamkan. Selanjutnya, Eiril dimakamkan di Kampung Geger Beas, Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Senin (13/6) siang.

Ridwan Kamil Minta Maaf Usai Pemakaman, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin atas dukungan dan doa selama pencarian hingga pemakaman Eiril.

Selain itu, Ridwan Kamil juga mengucapkan terima kasih kepada doa dan dukungan masyarakat selama proses pencarian hingga pemakaman almarhum Eiril. ● lus

## Hindari Hal Ini agar Tak Ditilang Selama Operasi Patuh 2022 Dimulai

JAKARTA (IM) - Operasi Patuh 2022 digelar serentak di seluruh Indonesia mulai Senin (13/6) hingga Minggu (26/6) mendatang. Ada sejumlah sasaran tugas dalam operasi ini.

Dikutip dari laman resmi akun @timpoldametro terdapat beberapa sasaran khusus operasi yang akan diberlakukan tilang oleh polisi.

Pertama, knalpot bising atau tidak standar. Hal itu tertuang dalam pasal 285 ayat 1 Jo pasal 106 ayat 3.

"Sanksi kurungan paling lama satu bulan, denda paling banyak Rp250.000," tulis keterangan tersebut yang diikuti pada Minggu (12/6).

Kedua, kendaraan menggunakan rotoar tidak sesuai peruntukan, khususnya pelat hitam. Ini melanggar pasal 287 ayat 4 dengan Sanksi kurungan paling lama satu bulan, denda paling banyak Rp250.000.

"Ketiga balap liar, melanggar pasal 297 jo pasal 115 huruf b. Sanksi kurungan paling lama satu tahun, denda paling banyak Rp

3.000.000," ujarnya. Keempat, Pasal 287 yaitu melawan arus dengan denda paling banyak Rp500.000. Berikutnya, Pasal 283 yaitu menggunakan HP saat mengemudi dengan denda paling banyak Rp750.000.

Keenam, Pasal 291 yaitu tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan denda paling banyak Rp250.000. Kemudian ketujuh, mengemudikan kendaraan tidak menggunakan sabuk pengaman, dengan denda paling banyak Rp250.000.

Kedelapan, berboncengan menggunakan sepeda motor lebih dari satu orang (tiga orang dalam sepeda motor) dengan denda paling banyak Rp250.000.

**Polda Jateng**  
Sementara itu, Polda Jawa Tengah menerbitkan 2.700 polisi untuk mendukung pelaksanaan Operasi Patuh Candi 2022.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi saat memimpin apel pasukan Operasi Patuh Candi 2022

di Semarang, mengatakan para personel dari 35 polres tersebut akan mendukung pelaksanaan operasi pada 13-26 Juni mendatang.

Menurutnya, Operasi Patuh Candi 2022 bertujuan untuk menyadarkan masyarakat tentang tertib berlalu lintas. Dengan demikian, kata dia, pelanggaran yang diakibatkan oleh pelanggaran lalu lintas pun bisa dihindari. "Kecelakaan itu pasti didahului oleh pelanggaran, itu hukum lalu lintas," katanya.

Kepada para petugas di lapangan, kata Luthfi, diminta untuk memahami sasaran operasi dengan melakukan pendekatan yang humanis, melalui sosialisasi, edukasi, serta imbauan simpatik ke masyarakat.

"Dengan demikian masyarakat tanpa sadar taat berlalu lintas," tambahnya.

Meski menggunakan upaya preventif dan pre-emptif, kapolda memastikan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui "Electronic Traffic Law Enforcement" (ETLE) atau tilang elektronik. ● lus



IDN/ANT

## APEL PASUKAN OPERASI PATUH 2022

Sejumlah personel Direktorat Polisi Lalu Lintas Polda Banten berpawai usai Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh tahun 2022 di Mapolda Banten di Serang, Senin (13/6). Apel yang diikuti 430 personel gabungan dari berbagai unsur tersebut menandai dimulainya pelaksanaan Operasi Patuh di wilayah setempat dengan tujuan untuk mengajak masyarakat tertib berlalu lintas serta menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.